



WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 230 TAHUN 2014

TENTANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 23-26/BAP/V-2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan/Pelelangan Serta Pelepasan Hak Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);

16. Keputusan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pelclangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang;
17. Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Menjual/melelang dan melepaskan hak kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.
- KETIGA** : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Pembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 230 TAHUN 2014

TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor				Harga Pasar (Samsat) Rp	Cek Fisik (Disub) %	Harga Pasar x Hasil Cek Fisik	Biaya Perbaikan (Rp)	Harga Limit (Rp)	Harga Jual (Rp)	Pemenang
		Nama / Jenis	Merk / Type		Polisi	Rangka	Mesin	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Minibus	2005	BA 60 A	MHMVB2WPN5K004459	4063-A30194	5642328 C	126.000.000	20.55%	25.893.000	0	26.700.000	29.500.000	Afansyah, S.Sos, MM
2	Inspektorat	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2006	BA 11 A	MHF2W41G76008668	1TR-6332261	1754042 C	120.000.000	21.00%	25.200.000	0	26.000.000	29.000.000	Drs. Yosefriawan
3	DPKA	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2001	BA 1619 QT	MHF11KF80-10055289	7K-0413550	0525590 C	89.000.000	18.70%	16.643.000	0	17.400.000	20.100.000	Drs. Amritha Luthan, MM
4	Daglar Umum	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1991	BA 1671 BM	MHF21KF50-01150932	5K-9189496	1197263 C	33.000.000	14.90%	4.917.000	0	5.500.000	7.400.000	Edison
									369.000.000		72.653.000	0	75.600.000	86.000.000	

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI